

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap tata kelola sampah pantai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, maka peneliti menyimpulkan bahwa, transparansi tata kelola sampah pantai belum optimal, sedangkan partisipasi dan akuntabilitasnya belum berjalan dengan baik adapun penjelasan rincian tentang tata kelola sampah pantai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai berikut:

A. Transparansi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang dalam menjalankan tugasnya terkait Pengangkutan Sampah dari TPS-TPS ke TPA, namun belum optimal karena kekurangan Sarana dan Prasarana sedangkan tentang biaya pengelolaan sampah tidak ada sama sekali.

B. Partisipasi

Tidak ada partisipasi masyarakat mengenai kemampuan masyarakat dan civil society untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan bersama pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang) terkait tata kelola sampah serta tidak ada peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media *check and balances* terkait tata kelola sampah

C. Akuntabilitas

Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel terkait tata kelola diperoleh kesimpulan bahwa belum mencapai target yang diharapkan karena kurangnya biaya/anggaran serta infrastruktur yang mendukung

6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota Kupang serta instansi terkait perlu mensosialisasikan budaya bersih kepada masyarakat.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang perlu adanya transparansi dalam pengelolaan biaya terkait tata kelola sampah pantai
3. Perlu ada partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan terkait tata kelola sampah oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media *check and balances* terkait tata kelola sampah
4. Perlu adanya kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel terkait tata kelola.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta. 2009.

Poerwandari. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia LPSP3*, Jakarta (2009).

B. SKRIPSI DAN TESIS

Nurul Awali Fauziah (2012). *Analisis Kebijakan Pengendalian Pencemaran Perairan Pesisir Kota Bandar Lampung*. Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lampung Bandar Lampung

Wulandari dan Titik, S. 2011. *Implementasi Manajemen Kolaboratif Dalam Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat*. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

Angela Chatlya (2016) *Pengelolaan Sampah Pantai oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung (Studi Pada Pantai Sukaraja Kecamatan Bumi Waras)*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Rizky Suherman (2014). *Upaya Penanggulangan Sampah Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda*. Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan

Kecamatan Samarinda Utara. Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman. Samarinda. Kalimantan Timur

Ferdinand Kalesaran (2015). Partisipasi Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kota Manado. *journal "Acta Diurna" Volume IV. No.5. Tahun 2015. Universitas Samratulangi Manado*

Roni M. Naatonis (2010). Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kampung Nelayan Oesapa Kupang. Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.

Luluk Ardyatmoko (2014). Implementasi Program Gerakan 1000 Bank Sampah di Kota Tangerang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang. Banten.

C. JURNAL

Kota Kupang dalam Angka 2018. "*Banyaknya Penduduk dan Laju Pertumbuhannya Menurut Kecamatan 2017*".

Muhammad Ilham Arisaputra (2013). Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia. *Jurnal Yuridika: Volume 28 No 2, Mei - Agustus 2013.*

Neneng Siti Maryam (2016). Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VI No. 1 / Juni 2016.* Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik Kridatama Bandung.

Lembaga Administrasi Negara (2000). Akuntabilitas dan Governance, Modul sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN, Jakarta.

A. Syamsu Alam (2012). Analisis Kebijakan Publik kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Hasanuddin Makassar.

Elida Imro'atin Nur Laily (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga.

Rizal Andreeyan (2014). Studi tentang partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan pembangunan di kelurahan Sambutan kecamatan sambutan Kota samarinda. Jurnal administrasi negara. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Universitas mulawarman. Samarinda. Kalimantan timur. Hal 1940

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

RPJMD Kota Kupang tahun 2013-2017.

(<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/opac/themes/bappenas4/templateDetail.jsp?id=157301&lokasi=lokal>)

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

E. INTERNET

Gubernur NTT Viktor Laiskodat Sebut Kota Kupang Paling Kotor! Ini Alasannya
(<http://kupang.tribunnews.com/2018/10/28/gubernur-ntt-viktor-laiskodat-sebut-kota-kupang-paling-kotor-ini-alasannya?page=all>)

Begini Aksi Bersih Sampah di Laut dan Pantai Oesapa dan Pasir Panjang,
(<http://kupang.tribunnews.com/2018/08/19/begini-aksi-bersih-sampah-di-laut-dan-pantai-oesapa-dan-pasir-panjang?page=all>)